

**PERJANJIAN KERJASAMA NOTARIS DENGAN BANK DALAM
MEMBERIKAN LAYANAN JASA-JASA NOTARIS DI KOTA PADANG
PANJANG**

TESIS

*Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

NAUFAL MAHDI RAFIE

NIM : 2220122074

Pembimbing :

Dr. Yoserwan, SH., MH., LLM

Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

PERJANJIAN KERJASAMA NOTARIS DENGAN BANK DALAM MEMBERIKAN LAYANAN JASA-JASA NOTARIS DI KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK

**(Naufal Mahdi Rafif, 2220122074, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas 128 halaman, 2025)**

Dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pertanggungjawaban Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik harus dapat menciptakan ketentuan-ketentuan yang tidak saja menimbulkan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dengan perjanjian kerjasama Notaris dengan Bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1.) Bagaimana kedudukan perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris di Kota Padang Panjang? 2.) Bagaimana penerapan perjanjian kerjasama Notaris dengan pihak Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris di Kota Padang Panjang? Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu Yuridis Empiris, dengan Lokasi penelitian di Kota Padang Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian kerja sama antara Notaris dan Bank dalam memberikan layanan jasa-jasa Notaris berpotensi mengurangi independensi Notaris, sehingga cenderung berpihak kepada Bank. Segala permintaan Bank dilaksanakan oleh Notaris sesuai keinginan dan kebutuhan Bank, yang berdampak pada keberpihakan Notaris dan mengurangi kemandiriannya dalam menjalankan jabatan. Secara praktik, perjanjian kerjasama tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara terkait adanya sebab yang tidak terlarang, yang berimplikasi pada batalnya perjanjian demi hukum. Penerapan perjanjian kerjasama antara Notaris dan Bank dalam penyediaan layanan jasa-jasa Notaris dilakukan melalui mekanisme formal yang telah disepakati bersama. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kerjasama ini menghadapi kendala seperti ketidakseragaman prosedur, keterbatasan koordinasi antara Notaris dan pihak Bank, serta adanya tekanan administratif. Dengan demikian, meskipun kerjasama Notaris dan Bank memberikan kemudahan dalam layanan hukum, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada mekanisme yang jelas, koordinasi yang baik, serta komitmen Notaris untuk menjaga profesionalisme dan integritas jabatan, sehingga tujuan layanan hukum yang akuntabel dan terpercaya dapat tercapai.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama; Notaris; Bank; Layanan Jasa-Jasa Notaris dan Kota Padang Panjang.

COOPERATION AGREEMENT BETWEEN NOTARY AND BANK IN PROVIDING NOTARY SERVICES IN PADANG PANJANG CITY

ABSTRACT

(Naufal Mahdi Rafif, 2220122074, Thesis, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University 128 pages, 2025)

In Article 16, paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 of 2004 regarding the Position of Notary, states that in carrying out their duties, a Notary is obliged to act honestly, diligently, independently, impartially, and to protect the interests of the parties involved in legal acts. As a public official authorized to create authentic deeds, a Notary must establish provisions that not only provide legal certainty for the broader community but also ensure legal protection for the Notary in performing their duties, particularly in the context of cooperation agreements with Banks. The research problems formulated in this study are: 1) What is the legal position of Notary cooperation agreements with Banks in providing Notary services in Padang Panjang City? and 2) How is the implementation of Notary cooperation agreements with Banks in providing Notary services in Padang Panjang City? This study employs an empirical juridical approach, with the research conducted in Padang Panjang City. The results indicate that cooperation agreements between Notaries and Banks in providing notarial services have the potential to compromise the independence of Notaries, often resulting in outcomes that favor the Bank. All requests from the Bank are executed by the Notary according to the Bank's wishes and requirements, which may lead to bias and reduce the Notary's independence in performing their duties. In practice, these cooperation agreements conflict with the provisions of the Notary Law and the Notary Code of Ethics, and therefore fail to meet the validity requirements of an agreement under Article 1320 of the Civil Code regarding the existence of a lawful cause, with implications for the nullity of the agreement by law. The implementation of cooperation agreements between Notaries and Banks is carried out through formal mechanisms mutually agreed upon. However, in practice, several obstacles arise, including non-uniform procedures, limited coordination between Notaries and Banks, and administrative pressures. Thus, while cooperation between Notaries and Banks facilitates legal services, the success of its implementation highly depends on clear procedural mechanisms, effective coordination, and the Notary's commitment to maintaining professionalism and integrity, ensuring that legal services are delivered in an accountable and trustworthy manner.

Keywords : Cooperation Agreement; Notary; Bank; Notary Services and Padang Panjang City